J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Peran BKKBN Dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Kb Kabupaten Ponorogo

Leila Sasi Kirana[1], Ardha Derby Nicola[2], Titis Purwaningrum[3]
[1]Universitas Muhammadiyah Ponorogo
[2]Universitas Muhammadiyah Ponorogo
[3]Universitas Muhammadiyah Ponorogo
E-mail: leilasassikirana@gmail.com[1] , nikofullclutch@gmail.com[2] , ning.titisumpo@gmail.com[3]

Article History:
Received: 15 Desember 2024
Revised: 07 Januari 2025
Accepted: 11 Januari 2025

Keywords: *BKKBN, KB,PLKB, Partisipasi Masyarakat, Ponorogo*

Abstrak: *Artikel ini membahas peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLKB memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang KB, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan akses terhadap layanan KB. Hambatan seperti kurangnya tenaga PLKB, distribusi alat kontrasepsi yang tidak merata, dan rendahnya kesadaran masyarakat diatasi melalui strategi seperti sosialisasi, pemberdayaan kader, dan program Kampung KB. Diharapkan artikel ini dapat menjadi referensi untuk memperbaiki pelaksanaan program KB di daerah lain dengan karakteristik serupa.*

PENDAHULUAN

Salah satu negara dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 281.603,8 ribu pada pertengahan tahun 2024, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (BPS, 2023). Ini menunjukkan peningkatan populasi yang cepat setiap tahun. Karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, ledakan penduduk ini terjadi. Ini menghasilkan dua aspek yang berbeda. Di sisi lain, ini telah menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak dibatasi akan berdampak negatif pada sektor sosial, ekonomi, dan politik, dan pada akhirnya akan menghambat kemajuan nasional. Kondisi ini dapat menjadi tantangan besar bagi Indonesia (Widya Febriyani Tiffani, 2020).

Masalah utama pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk penyebaran yang tidak merata, kualitas hidup yang buruk, dan peningkatan populasi yang terus-menerus Fitria Lestari (2024). Sulit bagi negara untuk meningkatkan kualitas dan kualitas penduduknya karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Kependudukan Indonesia menghadapi masalah seperti rendahnya perkembangan dan keluarga kecil yang baik (Rahmi Widia Purnama, 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat

rencana atau strategi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan tepat waktu.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada pengelolaan Keluarga Berencana dengan membentuk lembaga nonkementerian yang disebut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau BKKBN, untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk (Rahmi Widia Purnama, 2023). Menurut Peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2010, BKKBN diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengelola program Keluarga Berencana (KB) yang berskala nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengontrol jarak kelahiran. Namun demikian, upaya ini tidak mengurangi hak seseorang; tujuan umum Program Keluarga Berencana adalah untuk menciptakan keluarga kecil yang sesuai dengan kemampuan sosial dan ekonomi masing-masing keluarga melalui pengendalian kelahiran untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menurut Anisa Kurniatul Azizah (2023). Selain itu, program ini bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui perencanaan dan pengurangan kelahiran. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui program kependudukan dan KB (Trianziani, 2018).

Petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) melakukan banyak tugas, seperti memberikan penyuluhan, berkomunikasi dengan masyarakat, dan membantu akses ke layanan KB. Partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Nasional telah meningkat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk (Rosidah, 2021).

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang KB dan mengubah perilaku masyarakat untuk KB. Penyuluhan adalah bentuk pendidikan dan informasi tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, keluarga, dan/atau masyarakat. Namun, penyuluh KB didefinisikan sebagai PNS yang memenuhi syarat dan kompetensi tertentu serta diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Anna Fatchiya, 2021).

Namun, pasti akan ada hambatan saat melakukannya. Keterbatasan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk jumlah staf lapangan dan fasilitas penunjang seperti alat kontrasepsi dan sarana komunikasi, merupakan salah satunya. Sementara petugas lapangan (PLKB) kekurangan tenaga kerja dan jumlahnya tidak cukup untuk melayani populasi yang luas, ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi di wilayah terpencil sering kali terbatas. Situasi ini diperburuk oleh kualitas pendidikan yang rendah serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Pada akhirnya, ini menyebabkan sosialisasi program KB menjadi kurang efektif (Priscilla Bawing, 2017).

Sebagai petugas strategis di tingkat kelurahan atau desa, PLKB diharapkan dapat menjawab dan membawa misi perubahan. Semua ide baru tentang program KB dapat disampaikan kepada masyarakat, digali semua potensi masyarakat, dan pada akhirnya, PLKB dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola program KB (Karvianti, 2020).

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas peran BKKBN dan PLKB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Ponorogo. Diharapkan

artikel ini dapat memberikan wawasan tentang strategi yang efektif yang dapat diterapkan di tempat lain dengan kondisi serupa dengan menganalisis metode yang telah digunakan dan hasilnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang menggunakan data kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Metode ini memanfaatkan sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan staf DPPKB Kabupaten Ponorogo dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Gambar 1. Pelaksanaan Pelayanan KB di Faskes

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat yang mengikuti penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai manfaat KB, pentingnya pengendalian angka kelahiran, serta pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB menjadi salah satu pendekatan yang efektif. Masyarakat yang sebelumnya minim informasi kini lebih terbuka untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam program KB. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa kendala masih ada, seperti keterbatasan jumlah PLKB, mitos yang berkembang di masyarakat, dan rendahnya akses informasi di daerah pedesaan terpencil

Pembahasan

Ledakan penduduk adalah masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti di Indonesia. Ledakan penduduk menyebabkan peningkatan populasi yang cepat (Eka Mustika Yanti, 2023). Karena banyaknya penduduk, kebutuhan akan fasilitas seperti lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, sekolah, dan rekreasi meningkat. Jika tidak, kualitas sumber daya manusia negara akan sangat rendah. Untuk menghindari atau mengurangi masalah ini, tentu perlu diberikan perhatian yang besar untuk menemukan cara untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Program Keluarga Berencana (KB) adalah program yang terintegrasi dalam pembangunan dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Salah satu langkah preventif kesehatan yang paling penting adalah keluarga berencana (Silvia Nona Arnaldina Lale, 2021).

Keluarga Berencana adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dengan mengurangi jumlah bayi yang dilahirkan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004). Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1992 (tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera), keluarga berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan (Alfin Nur Aini, 2023).

Keluarga berencana (KB) adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan umur yang ideal untuk mendapatkan keturunan, mengatur kehamilan, dan memberikan bantuan pengertian dengan kebebasan konsepsi untuk membentuk keluarga yang baik (Natasya Farhana Niam, 2023).

Tujuan umum keluarga berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil yang bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan utama keluarga berencana adalah mengendalikan tingkat kelahiran sekaligus mengontrol pertumbuhan penduduk Alfin Nur Aini (2023).

Lima keuntungan keluarga berencana, menurut Departemen Kesehatan RI, adalah sebagai berikut:

1. Ibu:
   a. Perbaikan kesehatan secara badaniah dengan mencegah kehamilan berulang dalam jangka waktu yang lebih pendek.
   b. Adanya cukup waktu untuk mengasuh anak meningkatkan kesehatan mental dan emosi.
2. Anak yang dilahirkan
   a. Tumbuh secara wajar selama kehamilan.
   b. Mendapat perawatan dan asuhan yang cukup sesudah lahir.
3. Ayah
   a. Memperbaiki kesehatan fisiknya.
   b. Memperbaiki kesehatan mental dan emosinya karena kecemasan dan mendapatkan banyak waktu luang.
4. Seluruh keluarga
   a. Kesehatan fisik, mental dan emosi menjadi lebih baik.
   b. Satu keluarga yang direncanakan dengan baik, dapat memberi contoh yang nyata bagi generasi yang akan datang.
   c. Setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Mauzana, 2020).

Meskipun program Keluarga Berencana (KB) telah diterapkan, masih ada sebagian masyarakat di Indonesia yang enggan untuk mengikuti program tersebut. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keengganan masyarakat dalam menjalankan program KB ini (Eka Rahayu Puji Lestari, 2015). Beberapa faktor utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Budaya dan Nilai Sosial

   Banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di pedesaan dan wilayah yang masih kental dengan adat istiadat, memiliki pandangan bahwa memiliki banyak anak adalah hal yang diinginkan dan membawa keberuntungan.
2. Pemahaman yang Kurang Mengenai Manfaat KB

   Sebagian masyarakat kurang mendapat pemahaman yang mendalam mengenai manfaat program KB. Serta sosialisasi yang belum merata dan terbatasnya akses informasi terhadap program KB.
3. Pengaruh Agama

   Beberapa masyarakat mungkin masih menganggap bahwa KB bertentangan dengan keyakinan agama mereka atau merasa bahwa membatasi jumlah anak sama dengan

menghalangi rezeki.

4. Akses Terbatas ke Fasilitas dan Alat Kontrasepsi

   Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, hal ini menyebabkan masyarakat sulit mengikuti program KB secara rutin atau mendapatkan informasi dari petugas kesehatan yang kompeten.

5. Ketakutan terhadap Efek Samping Alat Kontrasepsi

   Banyak masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap efek samping alat kontrasepsi. Isu-isu seperti ini sering kali kurang dijelaskan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan, sehingga masyarakat menjadi takut mencoba.

6. Dukungan Pasangan dan Keluarga

   Di banyak budaya di Indonesia, keputusan memiliki anak lebih banyak didorong oleh pihak laki-laki atau keluarga besar, yang mungkin menganggap KB bukanlah hal yang penting atau justru menentangnya.

7. Tingkat Pendidikan

   Tingkat pendidikan juga berpengaruh pada kesadaran seseorang akan pentingnya KB. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang memahami atau kurang memiliki akses terhadap informasi tentang KB. Mereka mungkin tidak menyadari dampak positif KB terhadap kesejahteraan keluarga secara jangka panjang.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB di Indonesia (Ernawati, 2023). Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan BKKBN:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi: BKKBN melakukan kampanye penyuluhan tentang pentingnya keluarga berencana melalui berbagai media, seperti media cetak, dan media sosial. Mereka juga melakukan sosialisasi langsung di masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kesadaran ber-KB yang rendah.
2. Pembentukan dan Pemberdayaan Kader: BKKBN membentuk dan melatih kader-kader KB di tingkat desa yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kader ini membantu masyarakat dalam memahami metode KB, serta memberikan informasi yang diperlukan mengenai program KB yang tersedia.
3. Program Kampung KB: Kampung KB adalah program BKKBN yang diterapkan di daerah-daerah yang membutuhkan penanganan khusus. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta layanan KB yang terjangkau dan berkualitas. Di kampung KB, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan pelayanan terkait KB dengan lebih mudah.
4. Pelayanan KB Gratis: BKKBN secara rutin menyediakan layanan KB gratis, terutama di daerah-daerah terpencil. Pelayanan ini biasanya bekerja sama dengan puskesmas dan tenaga medis lokal. Program ini mencakup pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, suntik KB, dan implan.

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengelola program Keluarga Berencana di lapangan. Media menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan informasi tentang penyuluhan, seperti melalui kampanye atau media massa lainnya; penyuluh KB di lapangan; petugas medis, seperti bidan desa dan dokter dan anggota staf keperawatan yang ada di setiap desa atau kelurahan (Anna Fatchiya, 2021). Salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang memberikan kontribusi terbesar untuk keberhasilan Keluarga Berencana adalah Kecamatan Ngrayun.

Penyuluh Keluarga Berencana memiliki beberapa tanggung jawab dalam program kerjanya, seperti:

1. Mengelola pelaksanaan program KB Nasional di tingkat desa dan atau kelurahan.
2. Mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB Nasional di tingkat desa dan atau kelurahan.
3. Menggalakkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di tingkat desa dan kelurahan.
4. Menggalakkan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mensukseskan program KB Nasional di tingkat desa dan kelurahan (Herlina, 2022).

Dalam pelaksanaan program KB Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program KB, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan tahap persiapan untuk menyiapkan data dasar program KB di setiap RT sebagai dasar dalam pembuatan peta kerja untuk memudahkan penyusunan perencanaan pelaksanaan program KB.
2. Bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk mengevaluasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program KB sebagai dasar dalam pembuatan mekanisme operasional di setiap wilayah.
3. Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas teknis operasional pelaksanaan program KB untuk mendukung setiap kegiatan (Trianziani, 2018).

Dalam menangani masalah saat ini, peran petugas Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk berfungsi sebagai penghubung. Data dari sensus penduduk tahun 2020 telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik untuk proyeksi populasi Indonesia dari tahun 2015 hingga 2045. Hasil menunjukkan bahwa jumlah kelahiran di Indonesia akan turun sebanyak 6,6% pada tahun 2013, ketika jumlah kelahiran mencapai 4,95 juta, dan 4,62 juta pada tahun 2023. Meskipun angka kelahiran telah menurun, namun angka tersebut masih tinggi. Oleh karena itu, petugas PLKB diharapkan terus mendorong masyarakat untuk belajar tentang KB untuk menurunkan angka kelahiran di Indonesia.

Mengingat betapa pentingnya PLKB bagi keberhasilan program KB nasional, petugas lapangan harus diberdayakan lebih untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memberikan informasi kepada keluarga berencana dan program terkait lainnya dengan lebih cepat, akurat, dan berkesinambungan. Selain meningkatkan jumlah PLKB, kinerja dan kemampuan petugas PLKB harus ditingkatkan untuk memaksimalkan peran mereka. Pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan melalui program KB, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan (Karvianti, 2020).

Untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan program KB saat ini dan di masa mendatang, PLKB harus selalu diikuti dengan berbagai kemampuan dan keterampilan. Petugas PLKB harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Kemampuan Berkomunikasi

   Diharapkan PLKB memiliki kemampuan untuk melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Dengan kemampuan ini, petugas lapangan KB dapat menjelaskan masalah gizi, kesehatan ibu, dan HIV/AIDS kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya serta membagi informasi tentang anatomi fisiologi alat reproduksi dan kontrasepsi.
2. Kemampuan Bekerja dengan Data

   PLKB dalam melaksanakan tugas bekerja berdasarkan peta dan data lapangan. Untuk itu proses pengumpulan, pengolahan, menyajikan dan memanfaatkan data kependudukan/keluarga, demografi dan kesertaan ber-KB merupakan satu perangkat kerja yang harus dikuasai PLKB.
3. Kemampuan Membangun Jaringan/ Koordinasi

   PLKB harus mampu membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak, tidak

hanya unsur pemerintah seperti Camat, Kepala Desa, Koramil, Polsek, Puskesmas/Pustu, dan lain-lain (Karvianti, 2020).

Sebagai pengelola gerakan, PLKB harus memperhatikan kelengkapan unsur-unsur dalam pengelolaan di tingkat desa dan kelurahan agar upaya peningkatan masyarakat terkait program KB dapat dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas peran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Ponorogo. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia, dengan berbagai dampak negatif seperti kualitas hidup yang rendah, distribusi penduduk yang tidak merata, dan beban sosial ekonomi yang meningkat.

BKKBN sebagai lembaga nonkementerian bertugas mengelola program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengelolaan kelahiran, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. PLKB memainkan peran penting di tingkat lokal sebagai penghubung dan penyuluh, memberikan edukasi, akses layanan KB, dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program KB, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penunjang, akses terbatas di wilayah terpencil, pemahaman masyarakat yang rendah, serta kendala budaya, agama, dan pendidikan. Untuk mengatasi hambatan ini, BKKBN melakukan berbagai strategi seperti sosialisasi, pelatihan kader, penguatan program Kampung KB, dan penyediaan layanan KB gratis.

Pemberdayaan PLKB menjadi kunci keberhasilan program KB. PLKB perlu dilengkapi dengan kemampuan komunikasi, pengelolaan data, dan jaringan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas mereka di lapangan. Peningkatan jumlah petugas, pelatihan, dan insentif juga diperlukan agar PLKB mampu menghadapi tantangan program KB di masa depan dan terus menurunkan angka kelahiran untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan artikel ini. Tanpa bantuan dan kerja sama yang solid, artikel ini yang berjudul "Peran BKKBN dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program KB Kabupaten Ponorogo" tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah memberikan dukungan, data, serta informasi terkait program Keluarga Berencana di Kabupaten Ponorogo. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang telah berbagi pengalaman, memberikan wawasan, serta mendukung pelaksanaan penelitian ini dengan sepenuh hati. Selain itu, terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo yang telah berpartisipasi aktif dalam penelitian ini, khususnya para kader, tokoh masyarakat, dan keluarga peserta program KB yang bersedia memberikan waktu, pandangan, serta pengalaman mereka terkait program ini. Kami juga mengapresiasi kerja sama dari pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penelitian ini. Tak lupa, terima kasih kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Titis Purwaningrum, SE., M.MA, yang telah memberikan

bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga dalam proses penyusunan artikel ini. Dukungan dan nasihat beliau sangat membantu kami dalam memahami lebih dalam tentang pentingnya program KB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap artikel ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi yang berguna, dan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program Keluarga Berencana, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi kemajuan Bersama.

DAFTAR REFERENSI

Afin Nur Aini, L. N. (2023). Penggunaan Jenis Program Keluarga Berencana (KB) Masyarakat Desa Kedungsumur, Krembung, Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 4 (4)*, 3059.

Andesa Putra, H. W. (2023). Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 31.

Anisa Kurniatul Azizah, F. M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 10 (1)*, 112.

Anna Fatchiya, A. S. (2021). Peran Penyuluhan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Pengetahuan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) Kelompok Masyarakat Miskin. *Jurnal Penyuluhan, 17 (01)*, 65.

BPS. (2023). *Jumlah penduduk Indonesia 2024*. Retrieved from BPS Indonesia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-pendudukpertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html

Eka Mustika Yanti, D. W. (2023). Edukasi Pentingnya Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur (WUS) Di Dusun Anjani Timur Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 75.

Eka Rahayu, E. K. (2015). Deskripsi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Cakupan Peserta Kb Aktif Pada Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu Dan Anak (Pws-kia). *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 27.

Ernawati, S. N. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keefektifan Program Keluarga Berencana Melalui Edukasi Alat Bantu Pengambilan Keputusan Dalam KB di Pmb Mira Haryati Bangsalan Teras Boyolali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4 (1)*, 23.

Fitria Lestari, E. P. (2024). Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran dalam Menerapkan KB di Rw 04 Desa Sirnagalih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua, 2 (1)*, 62.

Herlina. (2022). Analisis Kesiapan Para Penyuluh Keluarga Berencana Kota Kendari dalam Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2)*, 145.

Karvianti, A. D. (2020). Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Pelayanan Peserta Keluarga Berencana pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Paradigma, 1 (3)*, 358.

Mauzana, P. F. (2020). Upaya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang. *Journal Ilmu Pemerintahan, 8 (3)*, 745-746.

Natasya Farhana Niam, L. A. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang KB Pasca Salin dengan Keikutsertaan Menjadi Akseptor KB Literature Review. *Jurnal Nusantara Medika, 6 (2)*, 67.

Nurmahdelena, A. (2016). Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir. *Journal Administrasi Negara, 4 (4)*, 4872.

Priscilla Bawing, R. S. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Berencana: Studi Kasus di Malinau. *Journal of Community Medicine and Public Health, 33 (12)*, 617.

Putri, V. D. (2022). Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Pmb Lismarini Kec. Talang Kelapa. *Jurnal Peduli Masyarakat, 4 (4)*, 640.

Rahmi Widia Purnama, F. K. (2023). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur). *:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1 (3)*, 239.

Rosidah. (2021). Pelayanan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. *Jurnal Progres Administrasi Publik, 1 (1)*, 10.

Suharyanti, M. H. (2021). Kampanye Generasi Berencana (GenRe), Sikap Generasi Z di Jakarta, dan Penetrasi Media Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 25 (2)*, 204.

Susanti, H. A. (2015). Strategi Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) . *Jurnal Komunikasi ASPIKOM, 2 (4)*, 245.

Tiffani, Widya Febriyani. (2020). Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi,* 7 (3).

Trianziani, S. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT. 4 (4)*, 133.

Widya Febriyani Tiffani, M. M. (2020). Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7 (3)*, 526.